BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Perencanaan

2.1.1. Definisi Perencanaan Ekonomi

Conyers dan Hills (dalam Arsyad, 1999: 112) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses yang bersinambung yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang.

Berdasarkan definisi di atas maka ada empat elemen dasar perencanaan yaitu:

- a. Merencanakan berarti memilih. Menyiratkan hubungan antara perencanaan dengan proses pengambilan keputusan sangat erat dalam proses pengambilan keputusan. Hubungan ini terutama berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan dan urut-urutan tindakan di dalam proses pengambilan keputusan.
- b. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumberdaya. Perencanaan mencakup proses pengambilan keputusan tentang bagaimana penggunaan sumberdaya yang tersedia sebaik-baiknya, sehingga kuantitas dan kualitas sumberdaya berpengaruh dalam memilih tindakan yang akan dilakukan.
- c. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan. Konsep ini muncul sebagai akibat dari sifat dan proses penetapan tujuan di mana sering terjadi tujuan didefinisikan secara kurang tegas akibat dari penetapan tujuan yang dilakukan orang lain.

d. Perencanaan untuk masa depan. Tujuan dalam perencanaan dirancang untuk dicapai di masa yang akan datang sehingga perencanaan berkaitan dengan masa depan.

Mohammad Hatta mendefinisikan perencanaan sebagai alat untuk mengadakan perekonomian nasional yang teratur, yang direncanakan tujuan dan jalannya. Sedangkan Widjojo Nitisastro berpendapat bahwa perencanaan pada dasarnya berkisar pada dua hal yaitu penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan kongkrit yang hendak dicapai dan pilihan-pilihan di antara cara-cara alternative yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Arsyad, 1999: 114).

2.1.2. Fungsi Perencanaan Ekonomi

Agar dapat mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, maka harus dilihat terlebih dahulu fungsi dari perencanaan yaitu (Arsyad, 1999: 116):

- a. Dengan perencanaan diharapkan terdapat suatu pengarahan dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan
- b. Dengan perencanaan dapat dilakukan suatu perkiraan potensi, prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang.
- c. Perencanaan memberikan kesempatan untuk menentukan pilihan yang terbaik.
- d. Dengan perencanaan maka dapat dipilih penyusunan skala prioritas dari pentingnya suatu tujuan.

- e. Perencanaan dapat dipakai sebagai alat untuk mengukur atau untuk mengadakan evaluasi.
- 2.1.3. Ciri-ciri Perencanaan Ekonomi.

Perencanaan ekonomi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut (Arsyad, 1999: 115):

- a. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan social ekonomi yang mantap, yang tercermin dalam usaha pertumbuhan ekonomi yang positif.
- Usaha yang tercermin dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan perkapita.
- c. Usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi atau sering disebut sebagai usaha diversifikasi ekonomi.
- d. Usaha perluasan kesempatan kerja.
- e. Usaha pemerataan pembangunan (distributive justice).
- f. Usaha pembinaan lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan pembangunan.
- g. Usaha secara terus menerus untuk menjaga stabilitas ekonomi.
- 2.1.4. Unsur-unsur Pokok Perencanaan Ekonomi

Setiap perencanaan ekonomi harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut (Arsyad, 1999: 115):

- a. Kebijakan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan.
- b. Adanya kerangka rencana makro
- c. Perkiraan sumber-sumber pembiayaan pembangunan.

- d. Uraian kerangka kebijaksanaan yang konsisten.
- e. Penyusunan program investasi secara sektoral.
- f. Administrasi pembangunan yang mendukung.

2.2. Pembangunan Ekonomi

2.2.1. Definisi dan Pengertian Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat. Pada umumnya pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai sutu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu Negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi mempunyai pengertian (Arsyad, 1999: 12):

- a. Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus menerus.
- b. Usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita.
- Kenaikan pendapatan perkapita harus terus terus berlangsung dalam jangka panjang.
- d. Perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang.

2.2.2. Tujuan Pembangunan Ekonomi.

Tujuan pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut (Todaro, 1995: 144):

a. Untuk meningkatkan ketersediaan dan memperluas penyebaran barangbarang kebutuhan pokok seperti bahan makanan, tempat tinggal, sarana kesehatan dan perlindungan keamanan bagi semua anggota masyarakat.

- b. Untuk meningkatkan taraf hidup yang meliputi pendapatan tertinggi, tersedianya lapangan kerja yang lebih banyak, sarana pendidikan yang lebih baik dan perhatian yang besar terhadap pelestarian nilai-nilai budaya dan kemanusiaan.
- c. Untuk memperluas ragam pilihan ekonomi dan social bagi masing-masing negara atau bangsa yang bersangkutan melelui usaha untuk memerdekakan diri dari perbudakan ketergantungan pihak lain.

2.2.3. Tahap-tahap Pembangunan Ekonomi

Menurut W.W. Rostow proses pembangunan ekonomi dibedakan menjadi lima tahap yaitu (Arsyad, 1999: 47-54):

- Masyarakat tradisional (the traditional society)
 Pada tahap ini terlihat masyarakatnya memiliki faktor produksi terbatas yang ditandai oleh cara produksi yang relative masih primitive, dan cara hidup masyarakat yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai kurang rasional. Tingkat produktivitas pekerja masih rendah serta struktur sosialnya bersifat hirarkis, yaitu mobilitas vertical anggota masyarakat dalam struktur social kemungkinannya kecil.
- 2. Prasyarat tinggal landas (the preconditions for take-off)

Pada tahap ini masyarakat mempersiapkan dirinya untuk mencapai pertumbuhan atas kekuatannya sendiri. Terlihat adanya dua corak yaitu perubahan dicapai dengan dengan perombakan masyarakat tradisional yang sudah lama ada serta perubahan tanpa perombakan sistem masyarakat tradisional.

3. Tinggal landas (the take-off)

Pada awal tahap ini terjadi perubahan yang drastis dalam masyarakat seperti revolusi politik, terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi, atau terbukanya pasar baru sehingga terjadi peningkatan investasi. Rostow mengemukakan tiga ciri utama dari Negara yang sudah mencapai masa tinggal landas, yaitu:

- (a). Terjadinya kenaikan investasi produktif dari 5 persen atau kurang menjadi 10 persen dari produk nasional bersih
- (b). Terjadinya perkembangan satu atau beberapa sektor industri dengan tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi (leading sektor).
- (c). Terciptanya suatu kerangka dasar politik, sosial dan kelembagaan yang bias menciptakan perkembangan sektor modern dan eksternalitas ekonomi yang bias menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang terus terjadi.

4. Menuju kedewasaan (the drive to maturity)

Suatu keadaan di mana masyarakat sudah secara efektif menggunakan teknologi modern pada hampir semua kegiatan produksi. Pada tahap ini sektor-sektor pemimpin lama yang akan mengalami kemunduran. Sektor-sektor pemimpin coraknya ditentukan oleh perkembangan teknologi, kekayaan alam, sifat dari tahap lepas landas serta kebijakan pemerintah.

5. Masa konsumsi tinggi (the age of high mass-consumption)

Pada masyarakat di masa ini lebih ditekankan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat, bukan lagi pada masalah produksi.

2.3. Pembangunan Ekonomi Daerah

2.3.1. Pengertian Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999: 298). Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah penekanan terhadap kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan.

2.3.2. Strategi Pembangunan Daerah

Agar tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat dicapai maka pelaksanaannya harus bertumpu pada strategi pembangunan daerah. Strategi pembangunan ekonomi daerah dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok besar (Arsyad, 1999: 310-313):

- a. Strategi pengembangan fisik atau lokalitas
- b. Strategi pengembangan sumber daya manusia
- c. Strategi pengembangan dunia usaha
- d. Strategi pengembangan masyarakat

Perencanaan dalam pembangunan ekonomi daerah mutlak diperlukan dikarenakan beberapa hal yang mempengaruhinya antara lain (Arsyad, 1999: 304):

a. Spread effects

Spread effects adalah suatu pengaruh yang menguntungkan karena adanya kegiatan ekonomi yang dilakukan daerah lain, misalnya bertambahnya kesempatan kerja bagi daerah sekitar akibat adanya perluasan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh daerah didekatnya.

b. Back wash effects

Back wash effects adalah dampak yang merugikan bagi masyarakat akibat adanya perluasan kegiatan ekonomi di suatu daerah, misalnya tingkat investasi yang semakin menurun di suatu daerah karena tingkat pendapatan yang diperoleh masyarakat.

c. Tricling down effects

Tricling down effects adalah imbas yang dirasakan oleh masyarakat akibat adanya perluasan kegiatan ekonomi di suatu daerah, misalnya adanya kegiatan atau pekerjan baru bagi masyarakat sehingga dapat menambah pendapatan.

d. Polarisation effects

Polarisation effects adalah adanya perbedaan yang sangat mencolok antara suatu daerah dengan daerah lain yang disebabkan adanya konsentrasi kegiatan ekonomi di suatu wilayah.

Perencanaan pembangunan daerah juga memberikan beberapa manfaat antara lain (Sukirno, 1976: 116):

- a. Untuk membentu pemerintah pusat dalam meneliti proyek yang akan dilaksanakan di daerah tersebut
- Untuk menciptakan desentralisasi yang efektif untuk kemudian menciptakan administrasi yang lebih efisien.
- c. Untuk memberikan pengarahan kepada sektor swasta sehingga kegiatan investasi dapat dilaksanakan secara efisien dan dapat memberikan konteribusi yang maksimal terhadap pembangunan ekonomi.

Sedangkan menurut Blakely ada enam tahap dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah yaitu (Kuncoro, 2004: 48): pengumpulan dan analisis data, pemilihan strategi pembangunan daerah, pemilihan proyek pembangunan, pembuatan rencana tindakan, penentuan rincian proyek, dan persiapan secara keseluruhan.

2.3.3. Tujuan Pembangunan ekonomi daerah

Tujuan dari pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah adalah (Karjoredjo, 1999: 36):

- Kemakmuran, dicerminkan dengan tingginya pendapatan masyarakat dengan batasan minimal untuk kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, serta papan.
- Keadilan, dicerminkan melalui distribusi pendapatan sesuai dengan kebutuhannya, prestasi kerja, dan sesuai dengan jasanya.

 Kesejahteraan, dengan indikator kesempatan kerja dan cepatnya pertumbuhan pendapatan perkapita.

2.4. Konsep Daerah

Pengertian daerah berbeda-beda tergantung pada aspek tinjauannya, dari aspek ekonomi daerah memiliki pengertian (Arsyad, 1999: 297-298):

a. Daerah homogen

Daerah dipandang sebagai ruang di mana terjadi kegiatan ekonomi dengan sifat-sifat yang sama. Perbedaan internal serta interaksi di dalam wilayah itu dianggap tidak penting. Sifat-sifat yang sama antara lain : pendapatan perkapita, sosial budaya, dan geografis .

b. Daerah nodal

Suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi.

c. Daerah perencanaan

Konsep daerah didasarkan atas ekonomi ruang yang berada di bawah satu administrasi tertentu, seperti satu propinsi, kabupaten dan kecamatan.

2.5. Konsep Keunggulan Komparatif Daerah

Pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan dari pembangunan suatu daerah.

Peertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat tergantung pada banyak atau tidaknya sektor-sektor ekonomi yang mempunyai keunggulan komparatif, artinya sektor-sektor ekonomi tersebut mempunyai potensi untuk dapat membarikan kontribusi

25

terhadap pertumbuhan daerah. Sehingga sektor-sektor ekonomi yang mempunyai keunggulan komparatif perlu diperhatikan mengingat peranannya sebagai penentu laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menentukan sektor-sektor ekonomi mana yang mempunyai keunggulan komparatif adalah dengan menggunakan metode analisis *Location Quotient (LQ)*. Keuntungan dari penggunaan metode ini adalah secara cepat dapat mengetahui sektor-sektor ekonomi mana yang yang menjadi sektor unggulan atau sektor basis komparatif.

2.6. Produk Domestik Regional Bruto

2.6.1. Konsep dan Definisi Produk Domestik Regional Bruto

Suatu indikator diperlukan oleh daerah untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan di daerah tersebut. Pendapatan regional adalah suatu penyajian berupa deretan angka yang sampai saat ini masih dapat digunakan sebagai salah satu indikator tingkat pertumbuhan ekonomi regional atau daerah. Pertumbuhan ekonomi berdasarkan PDRB dapat dihitung dengan dua cara yaitu (Kuncoro, 2004: 84): menggunakan PDRB riil (harga konstan) dan PDRB nominal (harga berlaku). Pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan PDRB riil akan memberikan gambaran pertumbuhan output secara nyata.

Produk Domestik regional Bruto didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, sedangkan pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita adalah Produk Domestik Regional Bruto yang dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut (Kuncoro, 2004: 118).



2.6.2. Klasifikasi Lapangan Usaha Dalam PDRB

Klasifikasi lapangan usaha dalam PDRB dibagi menjadi sembilan kelompok (BPS, 2004: 44) yaitu:

1. Sektor Pertanian

Sektor pertanian mencakup segala pengusahaan yang didapat dari alam dan merupakan benda atau barang biologis (hidup).

2. Sektor Pertambangan dan Penggalian

Sektor pertambangan dan penggalian mencakup kegiatan penggalian, pengeboran, penyaringan, pencucian, pemilihan dan pengambilan segala macam pemanfaatan misalnya benda non migas, barang tambang, mineral dan barang galian yang tersedia di alam baik berupa benda padat, cair maupun gas. Semua yang dilakukan ini sifat dan tujuannya untuk menciptakan nilai guna dari barang tambang dan galian sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan, dijual atau diproses lebih lanjut.

3. Sektor Industri Pengolahan

Sektor industri pengolahan dibedakan menjadi dua sub sektor yaitu industri migas dan industri tanpa migas. Industri migas mencakup kegiatan pengolahan, pengilangan minyak bumi dan gas alam cair. Sedangkan industri non migas mencakup industri besar, industri sedang, industri kecil, dan industri rumah tangga

4. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih

Sektor listrik mencakup pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik, baik yang diselenggarakan oleh PLN maupun perusahaan non-PLN, dengan tujuan

untuk dijual. Sektor gas mencakup kegiatan penyediaan gas kota yang biasanya diusahakan oleh Perusahaan Gas Negara (PN Gas). Sedangkan sektor air bersih mencakup proses pembersihan, pemurnian dan proses kimiawi lainnya untuk menghasilkan air minum serta pendistribusian secara langsung melalui pipa dan alat lain ke rumah tangga, instansi pemerintah maupun swasta.

5. Sektor Bangunan

Bangunan adalah suatu kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan atau konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana lainnya.

6. Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran

Sektor perdagangan meliputi kegiatan membeli dan menjual barang untuk tujuan penyaluran tanpa merubah sifat barang. Sektor ini meliputi kegiatan perdagangan besar dan eceran. Sektor restoran mencakup usaha persediaan makanan dan minuman jadi yang pada umumnya dikonsumsi di tempat penjualan. Sektor hotel mencakup kegiatan persediaan akomodasi yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan sebagai tempat penginapan.

7. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Sektor transportasi meliputi kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. Sektor komunikasi mencakup kegiatan pemberian jasa pada pihak lain dalam hal pengiriman surat, wesel dan paket pos yang diusahakan oleh perum pos dan giro, serta

pengiriman berita melalui telegram, telepon dan telex yang diusahakan oleh PT Telkom.

8. Sektor Keuangan, Sewa, dan Jasa Perusahaan

Sektor bank dan lembaga keuangan lainnya secara umum meliputi kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan yang berupa penarikan dana dari masyarakat maupun penyalurannya kembali.

9. Sektor Jasa-jasa

Sektor jasa meliputi kegiatan sektor jasa pemerintahan umum dan sektor jasa swasta. Jasa pemerintahan umum meliputi administrasi pemerintahan dan jasa pemerintahan lainnya, sedangkan jasa swasta meliputi kegiatan sosial kemasyarakatan, hiburan dan rekreasi serta jasa perorangan dan rumah tangga.